

**IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN DAERAH PROVINSI NTB
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG INDUSTRI PARIWISATA HALAL
(Studi Kajian di Kabupaten Lombok Utara)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Disusun oleh :

ASMUNianto

NIM : 201610380211004

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
November 2019**

**IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN DAERAH PROVINSI NTB
NO 2 TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL
(STUDI KAJIAN DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

Diajukan oleh :

ASMUNianto
201610380211004

Telah disetujui

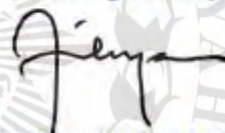
Pada hari/tanggal, Jumat/ 1 November 2019

Pembimbing Utama



Dr. Sulardi, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping



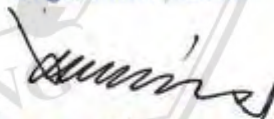
Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Direktur
Program Pascasarjana



Dr. Abdul Ilham, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Makh. Najih, SH., MH., Ph.D

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ASMUNianto

201610380211004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Jumat/1 November 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Sulardi, SH., M.Si
Sekretaris : Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum
Penguji I : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum
Penguji II : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **ASMUNianto**

NIM : **201610380211004**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN DAERAH PROVINSI NTB NO 2 TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL (Studi Kajian di Kabupaten Lombok Utara)** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Januari 2020

Yang menyatakan,



ASMUNianto

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji sukur yang sangat mendalam kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan segala nikmat yang telah diberikan penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN DAERAH NTB NO 2 TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL (Studi Kajian di Kabupaten Lombok Utara)”.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ayahanda H. Sahdi Wahid dan Ibunda Sariah, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, do'a, keikhlasan dan kasih sayangnya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
2. Dosen pembimbing dan penguji, Dr. Sulardi, SH., MSi, Dr. Fifik Wiryani SH., MSi., M.Hum, dan seluruh jajaran dosen Magister Ilmu Hukum UMM
3. Sahabat-sahabat seperjuangan dan semua pihak yang ikut serta memberikan data-data dalam menyelesaikan tesis ini, Dinas Pariwisata NTB, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, LPPOM MUI NTB, Ketua PHRI NTB dan lain sebagainya.

Semoga tesis ini memberi manfaat bagi pembacanya, dan mohon maaf yang mendalam jika kiranya masih ada kekhilafan dalam penyusunan tesis ini.

Malang, 18 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Latar Belakang Masalah	1
Tinjauan Pustaka	3
A. Pengertian Pariwisata	3
B. Pengertian Pariwisata Halal	4
C. Landasan Yuridis Pariwisata Halal	5
D. Potensi Konsep Pariwisata Halal di Indonesia	7
Metodologi Penelitian	9
A. Jenis Penelitian	9
B. Pendekatan Penelitian	9
C. Sumber Bahan Hukum	9
D. Teknik Pengumpulan Data	10
Hasil Penelitian dan Pembahasan	12
1. Profil dan Gambaran Umum Tempat Penelitian	12
2. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Lombok Utara	12
3. Potensi Pariwisata Halal di Kabupaten Lombok Utara	14
A. Analisis Strategi Pemerintah NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Dalam Memberdayakan Industri Pariwisata Halal Sebagai Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	16
1. Pemasaran dan Promosi	16
2. Pembinaan dan Pengawasan	17
3. Strategi Percepatan	18
4. Implementasi Strategi Industri Pariwisata Halal di Kabupaten Lombok Utara	19
a. Akomodasi	19
b. Biro Perjalanan	24
c. Restoran	26
B. Analisis Dampak Dari Industri Pariwisata Halal Pada Pasal 12 Dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB di Kabupaten Lombok Utara	27
A. Dampak Terhadap Masyarakat di Kabupaten Lombok Utara	27
B. Dampak Terhadap Tingkat Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Lombok Utara	30
Kesimpulan	33
Saran	34
Daftar Pustaka	35
Lampiran	

**IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN DAERAH NTB NO 2 TAHUN
2016 TENTANG PARIWISATA HALAL
(Studi Kajian di Kabupaten Lombok Utara)**

Asmunianto

Nim : 201610380211004

E-mail : asmunianto111@gmail.com

Dr. Sulardi, SH., M.Si

NIDN : 0012076402

Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M. Hum

NIDN : 0028056701

ABSTRAK

Pariwisata merupakan sumber devisa yang berpotensi sangat besar dalam membangun perekonomian sebuah negara, oleh karenanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat memperhatikan bagaimana membangun pariwisata agar para pelancong di dalam maupun dari luar negeri bisa menikmati semua fasilitas-pasilitas yang tersedia. Seiring berjalannya waktu maka sektor pariwisata memiliki perkembangan sehingga munculnya konsep pariwisata halal, yang mana pariwisata halal tersebut diterapkan agar mempermudah para pelancong dari seluruh dunia untuk menemukan pasilitas yang bernuansa syari'ah. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang pertama kali membuat peraturan daerah tentang pariwisata halal, di dalam perda tersebut dijelaskan bagaimana konsep pariwisata halal dan mengatur tempat dan akomodasi terkait dengan wisata yang bernuansa syari'ah. Pariwisata halal di Indonesia masih sangat minim keberadaannya khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah NTB pada saat ini tengah melakukan pengembangan terhadap pariwisata halal tersebut meskipun telah lama melakukan pengembangan dalam pariwisata konvensional, banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang wisata halal, bahkan wisata halal masih asing terdengar pada masyarakat awam. Wisata halal atau *Halal Tourism* adalah salah satu sistem pariwisata yang diperuntukan bagi wisatawan Muslim maupun non-muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah. Adapun beberapa dari ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 adalah Fasilitas, Pemberdayaan dan serta Peran Masyarakat dan Pengembangan Investasi Pariwisata Halal, dengan adanya peraturan tentang pariwisata halal kedepannya diharapkan bisa menarik perhatian para wisatawan diseluruh dunia.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Nusa Tenggara Barat, Pariwisata Halal

**ARTICLE IMPLEMENTATION OF NTB REGULATION NO 2 OF 2016 ON
HALAL TOURISM
(Study in North Lombok Regency)**

Asmunianto

Nim : 201610380211004

E-mail : asmunianto111@gmail.com

Dr. Sulardi, SH., M.Si

NIDN : 0012076402

Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M. Hum

NIDN : 0028056701

ABSTRACT

Tourism is a source of foreign exchange that has a huge potential in developing a country's economy, therefore the central government and regional governments are very concerned about how to develop tourism so that domestic and foreign travelers can enjoy all the facilities available. Over time, the tourism sector has developed so that the emergence of the concept of halal tourism, which is applied halal tourism to make it easier for travelers from all over the world to find shades of nuanced facilities. West Nusa Tenggara (NTB) is one of the provinces in Indonesia that first made local regulations on halal tourism, in the regulation explained how the concept of halal tourism and regulate places and accommodations related to sharia-nuanced tourism. Halal tourism in Indonesia is still very minimal, especially in West Nusa Tenggara Province, the NTB government is currently developing the halal tourism sector, although it has long been developing in conventional tourism, many people do not know about halal tourism, even halal tourism is still foreign. heard in ordinary people. Halal tourism or Halal Tourism is one of the tourism systems intended for Muslim and non-Muslim tourists whose implementation complies with sharia rules. As for some of the provisions applied by the Government of West Nusa Tenggara in Regional Regulation No. 2 of 2016 are Facilities, Empowerment and Community Role and Development of Halal Tourism Investment, with the existence of regulations on halal tourism in the future it is expected to attract the attention of tourists around the world.

Keywords: Regional Regulation, West Nusa Tenggara, Halal Tourism

Pendahuluan

Latar Belakang Permasalahan

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009, pembangunan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yaitu : 1. Asas manfaat 2. Asas kekeluargaan 3. Asas adil dan merata 4. Asas keseimbangan 5. Asas kemandirian 6. Asas kelestarian 7. Asas partisipasi 8. Asas berkelanjutan 9. Asas demokratis 10. Asas kesetaraan, dan 11. Asas kesatuan.¹ Kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2014 telah mencapai 9% atau sebesar Rp. 946,09 triliun. Sementara devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2014 telah mencapai Rp. 120 triliun dan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 11 juta orang.²

Keunggulan pariwisata halal bisa meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisatawan hal ini dikarenakan semakin bertambahnya populasi muslim dunia, terlihat sejak tahun 2012 ada 108 juta wisatawan muslim yang melakukan perjalanan wisata, meningkat di tahun 2015 yang mencapai 117 juta wisatawan muslim, lalu tahun 2016 mencapai 121 juta wisatawan muslim, dan juga mengalami peningkatan di tahun 2017 hingga 131 juta wisatawan muslim. Nilai perjalanan wisatawan muslim secara global diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun 2014 mencapai nilai USD 145 miliar, dan di tahun 2026 akan mencapai USD 300 miliar.³

Pariwisata halal di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat masih sangat minim keberadaannya, padahal negara negara lain yang bukan mayoritas muslim seperti Jepang, Thailand dan Korea Selatan telah menerapkannya, oleh karenanya pemerintah NTB dan para pihak yang terkait bekerja sama dalam melakukan pengembangan terhadap salah satu destinasi pariwisata tersebut.

¹ Made Metu Dahana, 2012. Perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan, Paramita Surabaya, hal.11

² Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat. Kajian dampak pariwisata terhadap Perekonomian Indonesia. Laporan Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. hal. 3

³ Alwafi Ridho Subarkah, 2018. Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). Jurnal Sospol, Volume 4 No 2 (Juli-Desember 2018). Hal. 59

Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang wisata halal, bahkan wisata halal masih asing terdengar pada masyarakat awam. Wisata halal atau *Halal Tourism* adalah salah satu sistem pariwisata yang diperuntukan bagi wisatawan Muslim maupun non-muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah. Menurut menteri pariwisata Arief Yahya meskipun Indonesia mayoritas nya muslim ketika tidak disertifikasi halal maka para wisman akan bertanya tanya apakah Indonesia halal atau tidak, terlihat dari performance Indonesia tidak sebgus Malaysia atau Singapura, hal ini bisa dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan muslim, Malaysia enam juta kunjungan, Thailand lima juta kunjungan, Singapura empat juta kunjungan dan Indonesia cuma dua juta kunjungan.⁴

Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang sering sekali mendapat penghargaan anugerah sebagai pariwisata halal tingkat dunia atau *World Halal Tourism Award* (WHTA) yaitu pada tahun 2015 dalam kategori (1). Destinasi halal terbaik di dunia (2). Destinasi bulan madu halal terbaik di dunia, dan pada tahun 2016 memenangkan kategori (1). Destinasi bulan madu terbaik di dunia (2). Website Travel halal terbaik (3). Novotel Lombok Resort&Villas dengan pantai resort halal terbaik. Di tingkat nasioonal yaitu (1). Kuliner halal khas daerah terbaik (2). Resort ramah wisatawan muslim terbaik (3). Website Travel ramah wisatawan terbaik. Dengan hasil yang telah diperoleh tentunya Nusa Tenggara Barat harus mempertahankan apa yang telah dimiliki, hal ini mendapat respon baik dari pemerintah daerah NTB, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

Pariwisata halal sangat mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi wisatawan muslim. Namun, bukan berarti wisatawan non-muslim tidak bisa menikmati wisata halal. Bagi yang non-muslim, wisata halal dengan produk halal ini adalah jaminan sehat. Karena pada prinsipnya, implementasi kaidah syariah itu berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya dalam produk maupun

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=q9e476JEafY> Di akses 16 Oktober 2018

jasa yang diberikan, dan tentu memberikan kebaikan. Berdasarkan uraian latar Belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1). Bagaimana Strategi Pemerintah NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Dalam Memberdayakan Industri Pariwisata Halal Sebagai Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan? (2). Bagaimana Dampak Pasal 12 Tentang Industri Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB di Kabupaten Lombok Utara?

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata “pari” berarti penuh, seluruh, atau semua, dan kata “wisata” yang bermakna perjalanan, menurut pendapat Yoeti yang dikutip oleh I Gusti Bagus Rai Utami syarat suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan wisata apabila :(1) perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain, di luar tempat kediaman orang tersebut tinggal; (2) tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang dan tidak mencari nafkah di tempat atau negara yang dikkunjunginya; (3) semata-mata sebagai konsumen di tempat yang di kunjungi.⁵ Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut UU No.10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

⁵ I Gusti Bagus Rai Utami 2017, *Pemasaran pariwisata Yogyakarta* Cp. Andi Offset, Hal. 1

4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar, yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri/diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.⁶ Menurut Gamal Suwanto pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. dorongan kepentingannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.⁷

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang dari suatu tempat ke tempat lain, untuk sementara waktu dengan maksud atau tujuan tidak untuk berusaha atau mencari nafkah ataupun menetap di tempat yang dikunjungi, akan tetapi untuk menikmati perjalanan tersebut sebagai rekreasi atau untuk memenuhi kegiatan yang beragam tanpa adanya suatu paksaan dan dilakukan perorangan maupun kelompok.

Pengertian Pariwisata Halal

Pengertian pariwisata halal dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas, produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah, sedangkan industri pariwisata halal di jelaskan dalam pasal 12 Peraturan Daerah NTB, yaitu usaha-usaha wisata

⁶ Yoeti. 2008, *Pemasaran Pariwisata Terpadu*. Bandung: Angkasa. Hal 115

⁷ Gamal Suwanto .2004, *Dasar-Dasar Pariwisata* Yogyakarta: Yogyakarta Andi Hal. 3

yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pariwisata halal menurut fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syari'ah, sedangkan destinasi wisata halal adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.⁸

Menurut Muhammad Djakfar, pariwisata halal adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pariwisata halal adalah konsep pariwisata yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan layanan sesuai dengan prinsip syari'ah.

Landasan Yuridis Pariwisata Halal

Pariwisata halal merupakan suatu segmen baru dalam dunia pariwisata di Indonesia, padahal pariwisata halal telah lama di implementasikan oleh negara-negara mayoritas Islam maupun Negara yang memiliki sedikit penduduk muslim seperti Thailand, Jepang, Singapura, New Zeland dan yang lainnya. Di Indonesia sendiri sebelum di canangkannya pariwisata halal oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah ada aturan hukum yang mengatur tentang usaha dan produk halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Fatwa MUI No 108 Tahun 2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah.

⁸ Fatwa MUI No. 108 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Sayari'ah

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut.⁹

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH
- i. Melakukan pembinaan Auditor halal, dan
- j. Melakukan kerjasama dengan Lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

2. Fatwa MUI No 108 Tahun 2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰

- a. Ketentuan hukum
- b. Prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syari'ah
- c. Ketentuan terkait para pihak dan akad
- d. Ketentuan terkait Hotel Syari'ah
- e. Ketentuan terkait wisatawan
- f. Ketentuan destinasi wisata
- g. Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage*
- h. Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syari'ah
- i. Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syari'ah

3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut.¹¹

- a. Penggolongan Usaha Hotel Syari'ah
- b. Penilaian dalam rangka sertifikasi Usaha Hotel Syari'ah
- c. Pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syari'ah dan
- d. Pembinaan dan pengawasan

⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹⁰ Fatwa MUI No 108 Tahun 2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah

¹¹ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah.

Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2015 kementerian pariwisata memutuskan untuk mengikuti kompetisi pariwisata halal WHTA yang diselenggarakan di Abudhabi, indonesia pun berhasil memenangkan 3 kategori 2 kategori di wakili oleh Lombok dan 1 kategori diwakili oleh hotel Hotel Sofyan Jakarta, dan sejak saat itu konsep pariwisata halal mulai di kembangkan oleh kementerian pariwisata. Pada tahun 2016 MUI mengeluarkan Fatwa No 108 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah, terdapat sejumlah ketentuan terkait standar syari'ah dalam fatwa tersebut antara lain aturan hotel syari'ah, SPA, Sauna, maupun tempat pijat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, biro perjalanan untuk memandu wisata agar terhindar dari kemaksiatan, minuman keras dan lain sebagainya.

Nusa Tenggara Barat sendiri setelah mendapatkan penghargaan dari WHTA mulai membuat Peraturan Gubernur yaitu Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Wisata Halal, dan tidak lama setelahnya keluar Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal. hal ini merupakan langkah yang sangat serius dilakukan oleh pemerintah NTB guna memberikan payung hukum untuk usaha pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat.

Potensi Industri Pariwisata Halal di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau, terdiri dari pulau utama dan pulau-pulau kecil yang memilikinya tentu saja hal ini membuat indonesia mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lainnya di dunia. Sebagai negara dengan tujuan wisata tentunya masyarakat indonesia harus menyajikan apa yang akan menjadi tujuan wisatawan, hal ini tentunya harus di kompilasi dengan akomodasi dan pasilitas yang memadai agar para wisatawan merasa nyaman dalam melakukan perjalanan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki 88% populasi muslim, lebih dari 17.000 pulau, 300 suku, 746 jenis bahasa dan dialek, serta *mega biodiversity* dan lebih dari 800.000 masjid, merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan

pariwisata halal karena pada dasarnya budaya Indonesia memiliki DNA gaya hidup halal (*halal lifestyle*).¹²

Menurut Akhmad Saefudin yang dikutip oleh Hendri Hermawan Adinugraha, wisatawan muslim mancanegara berkontribusi 126 miliar dolar 2011. Jumlah itu mengalahkan wisatawan dari Jerman, Amerika Serikat dan Cina.

Menurut data *Global Muslim Traveler*, wisatawan muslim Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang paling banyak berwisata. Namun, Indonesia tidak termasuk dalam 10 tempat destinasi kunjungan muslim.¹³ Sungguh miris jika negara sebesar Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang berlimpah ruah hanya berkontribusi dalam berwisata, seharusnya Indonesia dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia harus ikut terlinbat sebagai pelaku dan bisnis wisata. Fakta yang ada pariwisata syariah di Indonesia pada tahun 2013 yaitu hotel syariah bersertifikat baru 37 hotel. Sebanyak 150 hotel menuju operasional syariah. Begitu juga dengan restoran, dari 2.916 restoran, baru 303 yang bersertifikat halal. Sebanyak 1.800 mempersiapkan diri sebagai restoran halal. Sedangkan tempat relaksasi, SPA kini baru berjumlah tiga unit. Sebanyak 29 sedang proses untuk mendapatkan sertifikat.¹⁴

¹² Muhammad Djakfar, 2017. Pariwisata Halal Perspektif multi dimensi, UIN-maliki Press. Hlm. V

¹³ Akhmad Saefudin Adinugraha dkk. Desa Wisata : Konsep dan Implementasinya di Indonesia, dalam jurnal Human Falah: Volume 5. No. 1 Januari – Juni 2018

¹⁴ Ibid

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian Tesis ini Penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, peneliti akan menganalisis dan mengumpulkan data terkait dengan implementasi pasal 12 peraturan Daerah NTB. Menurut Ronny Hanitijo yang dikutip oleh Amirudin dan Zainal Asikin, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan *kajian sosiologi hukum (Sociologi of Law)*.¹⁵

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.
2. Pendekatan konseptual
Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.
3. Pendekatan historis
Pendekatan historis bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut.¹⁶

Sumber bahan Hukum

Dalam penelitian sosiologis ini, bahan-bahan hukum yang akan dipergunakan terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder :

1. Bahan Hukum Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber yang didapatkan langsung oleh peneliti dengan wawancara di lokasi penelitian, adapun yang menjadi narasumber dari penelitian ini adalah :

¹⁵ Amirudin dan Zainal.2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo, Jakarta.
hal. 133

¹⁶ Lop.Cit . hlm.110

- a. Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat
- b. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang NTB
- d. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB

2. Bahan-Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, artikel jurnal, bahan hukum dari internet, kamus, karya tulis Hukum atau pandangan ahli hukum yang berbentuk Disertasi, Hasil Penelitian, majalah dan Makalah.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Amiruddin dan Zainal Asikin, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interviu.¹⁷

1. Pengamatan (Observasi)

Metode observasi yang peneliti gunakan adalah metode observasi partisipatif dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek penelitian, baik pengamatan itu dilakukan dengan sesuai sebenarnya maupun yang dilakukan dalam situasi yang khusus terhadap respons atau implementasi dari Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal yang berlaku bagi masyarakat maupun investor di Kabupaten Lombok Utara.

2. Wawancara

Dengan wawancara, maka meneliti hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai :

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, Hal.67

- a. Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, wawancara dilakukan dengan narasumber Adi Yulianto selaku staf bagian destinasi, dalam wawancara dengan bapak Adi Yulianto peneliti menanyakan prospek pariwisata halal di NTB, data usaha pariwisata dan dampaknya terhadap masyarakat maupun tingkat kunjungan wisatawan
- b. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, wawancara dilakukan dengan narasumber Bapak Brata selaku Kepala Bidang Destinasi, peneliti menanyakan tentang bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah NTB dalam mengimplementasikan perda pariwisata halal dan bagaimana prospek pariwisata halal dalam meningkatkan kunjungan wisatawan
- c. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) cabang NTB, Wawancara dilakukan dengan narasumber Bapak Lanang selaku ketua PHRI cabang NTB. Peneliti menanyakan bagaimana PHRI mengimplementasikan Perda Pariwisata Halal di Hotel dan Restoran.
- d. Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang NTB. Wawancara dilakukan dengan narasumber Hj. Rauhun, SE selaku direktur LPPOM MUI cabang NTB, peneliti menanyakan jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi halal dan darimana sumber biaya untuk sertifikasi halal
- e. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), wawancara dilakukan dengan narasumber Sahibul Kahfi selaku ketua POKDARWIS Dusun, Lendang Luar, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, peneliti menanyakan dampak pariwisata halal terhadap pembangunan destinasi wisata

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil dan Gambaran umum tempat penelitian

1. Letak dan kondisi geografis Kabupaten Lombok Utara

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara $115^{\circ}46'$ - $119^{\circ}5'$ Bujur Timur dan $8^{\circ}10'$ - $9^{\circ}5'$ Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Nama Resmi : Kabupaten Lombok Utara
- b. Ibu Kota : Tanjung
- c. Provinsi : Nusa Tenggara Barat
- d. Batas Wilayah : Utara : Laut Jawa | Selatan : Kabupaten Lombok Barat & Kabupaten Lombok Tengah | Barat : Selat Lombok | Timur : Kabupaten Lombok Timur.
- e. Luas Wilayah : 776.25 km^2
- f. Jumlah Penduduk : 224.768 Jiwa
- g. Administrasi : Kecamatan : 5 | Kelurahan:-| Desa : 33

Dikutip dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua pulau besar, Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 277 pulau-pulau kecil. Dari 279 pulau yang ada, terdapat 44 pulau yang telah berpenghuni. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai $49.312,19 \text{ km}^2$ terdiri dari daratan seluas $20.153,15 \text{ km}^2$ (40,87%) dan perairan laut seluas $29.159,04 \text{ km}^2$ (59,13%), dengan Panjang garis pantai 2.333 km. luas pulau sumbawa mencapai 2/3 dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat atau sekitar $15.414,5 \text{ km}^2$ (76,49%), sedangkan luas pulau Lombok mencapai 1/3 dari luas dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat atau sekitar seluas $4.738,70 \text{ km}^2$ (23,51%).

Kabupaten Lomok Utara dengan luas wilayah $776,25 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari lima kecamatan dengan kondisi wilayah yang terdiri dari daratan dan lautan yang sama luas, tentunya menyimpan potensi alam dan keanekaragaman adat dan budaya yang sangat beragam, kabupaten yang sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan disebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok tentu merupakan sebuah keuntungan dalam pengembangan wisata bahari.

Tabel 1.
Jumlah Usaha Pariwisata

No.	Kabupaten /Kota	Biro Perjalanan	Hotel Bintang	Hotel Melati/Pondok Wisata	Rumah Makan/Restoran
1	Mataram	253	28	128	338
2	Lombok Barat	241	37	154	271
3	Lombok Utara	29	9	566	375
4	Lombok Tengah	57	4	105	126
5	Lombok Timur	21	2	143	265
Jumlah		601	80	1.096	1.375

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Tabel 2.
Jumlah fasilitas pelayanan dan tenaga kerja Rumah Makan/Restoran

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Restoran	Jumlah Meja	Jumlah Kursi	Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.	Mataram	338	2.836	10.489	1.713	
2.	Lombok Barat	271	1.420	5215	1.117	
3.	Lombok Utara	375	5.306	11.524	2.395	
4.	Lombok Tengah	126	818	2496	576	
5.	Lombok Timur	265	541	1.039	408	
6.	Sumbawa Barat	292	608	2.105	506	
7.	Sumbawa	200	1.094	4.376	933	
8.	Dompu	38	200	868	196	
9.	Bima	45	220	667	146	
10.	Kota Bima	66	363	1.299	261	
Jumlah		2021	13500	40.078	8.251	

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Tabel 3

Jumlah Fasilitas Pelayanan Tenaga Kerja Hotel Melati/Pondok Wisata

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Tenaga Kerja	
				Indonesia	Asing
1.	Mataram	122	2.438	1.620	
2.	Lombok Barat	149	920	788	
3.	Lombok Utara	566	4.329	2.815	
4.	Lombok Tengah	105	586	283	
5.	Lombok Timur	143	1.117	353	
6.	Sumbawa Barat	39	531	209	
7.	Sumbawa	53	843	284	
8.	Dompu	35	370	217	
9.	Bima	14	141	57	
10.	Kota Bima	18	403	125	
	Jumlah	1.244	11.678	6.751	

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Pariwisata halal sebagai segmen dari pariwisata konvensional memerlukan sarana dan akomodasi penunjang agar pariwisata halal bisa berjalan dengan baik, hal ini tentunya sangat mudah bagi Pulau Lombok yang telah lama dijuluki Pulau Seribu Masjid. dengan banyaknya destinasi wisata religi maupun wisata alam akan menyumbangkan destinasi bagi treveler muslim karena pariwisata halal tidak selalu berbicara mengenai makanan halal atau fashion halal, akan tetapi destinasi juga akan mempengaruhi minat wisatawan muslim untuk berkunjung ke Pulau Lombok.

Menurut Adi yulianto, Lombok yang memiliki penduduk mayoritas beragama muslim tidak sulit untuk mengembangkan pariwisata halal, hal ini karena banyaknya destinasi di Lombok yang sudah mendunia, seperti Gili Terawangan, Gili Meno, Gili air, Gunung Rinjani, dan di tambah lagi dengan akan di bangunnya pembangunan sirkuit Internasional Moto GP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika Lombok Tengah.¹⁸ Dengan adanya destinasi yang sudah ada tersebut tentunya akan mempermudah pemerintah daerah di NTB untuk mengembangkan pariwisata halal.

Potensi pengembangan pariwisata halal di pulau Lombok sangat besar jika dilihat dari jumlah penduduk muslim dunia, menurut *Pew Research*

¹⁸ Hasil wawancara dengan Adi yulianto selaku Staf di dinas pariwisata NTB, Pada Tanggal 5 Mei 2019

Center on Religion and Public Life, ada 1,6 miliar penduduk muslim dunia, atau 23,4 persen dari penduduk dunia yang mencapai enam miliar orang. Pada 2030, jumlah ini diprediksi akan meningkat menjadi 2,2 miliar atau 26,4 persen dari total penduduk dunia yang diperkirakan mencapai 8,3 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk muslim sebesar 1,5 persen per tahun.¹⁹

Strategi Pemerintah NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Dalam Memberdayakan Industri Pariwisata Halal Sebagai Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan

1. Pemasaran dan Promosi

Dalam rangka mengimplementasikan suatu aturan maka dibutuhkan sosialisasi dan promosi agar Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk memulai proses pemasaran seorang pemasar haruslah mengetahui keinginan konsumen yang pada umumnya dapat diketahui melalui penelitian pemasaran agar perusahaan mampu mengembangkan produk yang sesuai dengan harapan konsumen. Pengetahuan tentang harapan konsumen akan dapat membantu seseorang pemasar menyampaikan informasi kepada pelanggan dengan tepat tentang kelebihan produknya melalui aktivitas promosi sehingga diharapkan mampu memuaskan pelanggannya.²⁰

Pariwisata halal sebagai sebuah produk baru dalam pariwisata konvensional pastinya akan sulit diakses oleh wisatawan apabila promosi atau pemasaran tidak dilakukan. Dalam Pasal 9 dan 10 ayat 2 Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 dijelaskan : Pasal 9 ayat (2) Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi pariwisata halal sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan :

- a. Penataan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial

¹⁹ <http://fokus.news.viva.co.id/indepth/fokus/509102-potensi-raksasa-pariwisata-syariah>
diakses 26 Mei 2019

²⁰ Op.Cit. Pemasaran Pariwisata. hal.22

- b. Pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata halal
- c. Pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata halal yang aman, nyaman dan berdaya saing
- d. Peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata halal, dan Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 10. Pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI, dan HPI.

Menurut peneliti dengan adanya pemasaran dan promosi yang terstruktur tersebut pastinya akan mempermudah untuk memasarkan pariwisata halal agar sesuai dengan hasil yang akan diharapkan. Menurut H.L. Moh. Faozal, kepala Dinas Pariwisata NTB, berharap bahwa adanya diskusi antara pihak tim percepatan destinasi halal dan pelaku pariwisata di Lombok Sumbawa dapat menghasilkan strategi yang jitu dalam menggaet muslim traveller khususnya untuk datang berkunjung ke NTB, L. Faozal juga menargetkan jumlah 4 juta kunjungan ke NTB pada tahun 2019.²¹

2. Pembinaan dan Pengawasan

Adapun strategi dalam bentuk pembinaan terdapat dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah NTB yaitu:

Pasal 22

- 1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal
- 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Dinas

Pasal 23

- 1. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 1 harus melibatkan DSN-MUI
- 2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pembinaan dapat melibatkan BPPD, PHRI, ASITA, FKD, HPI
- 3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk
 - a. Sosialisasi
 - b. Stimulasi dan
 - c. Bimbingan dan pelatihan

²¹ <https://lombokinsider.com/destination-news/susun-strategi-pariwisata-halal-ntb-targetkan-4-juta-kunjungan-wisatawan-2019/> di akses 27 Mei 2019

Sedangkan pengawasan terdapat dalam Pasal 24 yaitu:
Pasal 24

1. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan pariwisata halal
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan DSN-MUI, PHRI, ASITA, HPI, FKD, dan BPPD
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dalam bentuk
 - a. Monitoring dan
 - b. Evaluasi

Menurut peneliti proses implementasi pembinaan dan pengawasan dalam perda pariwisata halal NTB berjalan kurang maksimal, dikarenakan tidak adanya peningkatan yang signifikan terhadap usaha-usaha dibidang pariwisata yang mengajukan sertifikasi halal. Menurut ketua MUI NTB, Pemda NTB perlu menguatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam konteks pengembangan wisata halal di NTB. Dalam kasus sertifikasi halal misalnya, MUI NTB telah berupaya untuk berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait dan meminta SKPD tersebut untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha baik Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM) dalam proses pengurusan pangan industry rumah tangga (PIRT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.²²

Dalam ketentuan penutup Fatwa MUI sendiri dijelaskan proses penyelesaian implementasinya jika ada permasalahan diantara pihak-pihak terkait yaitu apabila terjadi perselisihan diantara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syari'ah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Strategi Percepatan

Menurut Lalu fauzal selaku Kepala Dinas Pariwisata NTB dalam acara sosialisasi Perda No 2 Tahun 2016 di Hotel Lombok Raya bersama

²² A.Muchaddam Fahham. Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat. Aspirasi Vol. 8 No. 1 Juni 2017

skateholder bidang pariwisata pada hari kamis 23 Agustus 2017, dalam rangka untuk percepatan pengembangan pariwisata halal, beliau berharap seluruh pelaku pariwisata harus mengimplementasikan dalam setiap kegiatan kepariwisataan hal-hal yang menjadi syarat-syarat utama pariwisata halal baik itu dalam lingkup hotel, biro perjalanan, restaurant hingga seluruh aspek kepariwisataan di NTB. Dan beliau mengungkapkan strategi percepatan yang harus dilakukan sebagai berikut:²³

1. Perkembangan destinasi : Kita mencoba mendekati Desa-Desa yang ada agar dikemas menjadi destinasi desa wisata, sehingga perkembangan pariwisata halal dapat berkembang secara menyeluruh.
2. Peningkatan infrastruktur pariwisata halal
3. Pengembangan atraksi dan amenitas pariwisata halal kelas dunia : Peningkatan angka kunjungan dari berbagai Negara baik Negara mayoritas muslim atau non muslim yang mencari pelayanan dan fasilitas berbasis halal karena wisatawan non muslim juga percaya bahwa produk halal tersebut terjamin proses pengolahannya.

4. Implementasi Strategi Industri Pariwisata Halal di Kabupaten Lombok Utara

Industri pariwisata halal sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di jelaskan dalam pasal 13 terdiri atas Akomodasi, Biro Perjalanan, Restoran dan SPA.

a. Akomodasi

Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf destinasi di Dinas Pariwisata NTB, Adi Yulianto beliau mengatakan bahwa “Lombok merupakan mayoritas muslim yaitu 90% populasi dan ini memberikan kemudahan bagi Kepala Daerah untuk mengimplementasikan konsep pariwisata halal, karena pada dasarnya kita adalah halal tinggal dipoles sedikit untuk menjadikan pariwisata konvensional kita menjadi pariwisata halal, beliau juga menambahkan hampir 90,9% makanan di warung pinggir atau UKM kita adalah halal dan 1% nya bukan karena bahan makanannya bisa jadi dikarenakan cara pengolahan yang kurang tepat”.²⁴

²³ <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/sosialisasi-perda-no-2-tahun-2016-untuk-percepatan-pengembangan-pariwisata-halal/> di akses pada tanggal 19 Juli 2019

²⁴ Loc.cit. Wawancara dengan bapak Adi Yulianto

Berdasarkan wawancara dengan Adi Yulianto tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peluang Kabupaten Lombok Utara untuk menjadi tujuan destinasi halal sangat besar mengingat masyarakat Kabupaten Lombok Utara adalah mayoritas muslim dan memiliki budaya yang kental dengan keislaman.

Menurut Bapak Brata selaku Kepala Bidang Destinasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, beliau mengatakan bahwa “pariwisata halal merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk menarik kunjungan dari wisatawan dari negara-negara Islam, sekian banyak orang yang melakukan ibadah haji atau umroh asal Lombok setiap tahunnya mengeluarkan uang sejumlah Rp.35.000.000 atau Rp.40.000.000 dan dikalikan jumlah ribuan orang yang melakukan ibadah haji dan umrah dari Lombok, sangat banyak uang yang keluar setiap tahunnya dan bagaimana cara mengembalikannya kecuali dengan pariwisata, beliau juga menambahkan bahwa untuk kedepannya akan dibuatkan pantai yang di khususkan untuk wisata halal di Gili Meno dan sejumlah 11 hotel Restoran yang telah mendapatkan sertifikasi halal, salah satunya ada di Gili Trawangan, dan beliau optimis kedepannya pariwisata halal di Kabupaten Lombok Utara akan mengalami perkembangan karena adanya payung hukum yaitu Perda NTB tentang pariwisata halal.²⁵

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa pariwisata halal di Kabupaten Lombok Utara mengalami peningkatan hal ini terbukti dengan adanya Hotel Restoran yang sudah bersertifikat halal dan akan dibuatkan pantai halal untuk wisatawan muslim. Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi dari tiga provinsi yaitu Sumatra Barat dan Aceh yang telah mendeklerasikan diri sebagai tujuan wisata halal, maka pemerintah daerah NTB harus berbenah untuk menambah pasilitas dan akomodasi terkait tentang pariwisata halal, dalam hal ini pemerintah NTB bekerja sama DSN-MUI untuk menerbitkan sertifikasi halal kepada usaha-usaha yang berpartisipasi dalam wisata halal.

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Brata selaku Kepala Bidang Destinasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 8 Juli 2019

Tabel 4.

Data Restoran bersertifikat halal di NTB dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018

Tahun	Restoran (Hotel)	Restoran Non Hotel dan Rumah Makan
2012	6	
2013	1	
2014	2	
2015	5	75
2016	28	107
2017	7	52
2018	11	22
JTotal	60	256

Sumber : LPPOM MUI PROVINSI NTB

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa data usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal selalu ada setiap tahunnya, ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi pemerintah. Pemberian sertifikasi halal untuk industri pariwisata sangat penting bagi para wisatawan, sertifikat halal bukan hanya sebagai jaminan halal akan tetapi sertifikat halal bisa menjamin bahwa wisatawan tidak akan ragu dan bertanya apakah Kabupaten Lombok utara halal atau tidak halal, yang menarik dari data diatas adalah ketika tidak adanya hotel yang secara keseluruhan bersertifikat halal, yang tertera hanya restoran yang melekat pada restoran itu sendiri.

Hotel Grand Madani merupakan Hotel yang pertama kali menerapkan aturan Syariah di NTB, Hotel Grand Madani memiliki 56 kamar dengan tiga tipe, yaitu *Syari'ah Suite*, *Syari'ah Deluxe*, dan *Syari'ah Superior*, dengan fasilitas berupa sajadah, arah kiblat, jadwal waktu shalat secara tertulis, Al-Quran, kaligrafi, atau gambar ka'bah, tanda dilarang merokok, buku do'a sarung dan mukena, lembar nasehat keislaman, dan tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila lainnya. Dan pada fasilitas kamar mandi tamu, terdapat peralatan yang praktis untuk bersuci, peralatan yang baik untuk berwudhu, dengan kamar mandi yang tertutup.²⁶

²⁶ Suriadi. 2017. Analisis Implementasi Bauran Pemasaran Pada Hotel Grand Madani dan Lombok Raya Mataram-NTB, tesis. Program magister Ekonomi Syari'ah UIN Maliki Malang. hal 78

Hal berbeda ditunjukkan oleh Hotel Villa Bella di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara yang hanya menyediakan fasilitas minimal untuk kebutuhan wisatawan muslim seperti menyediakan paket Ramadhan, buka dan sahur, tidak menyediakan makanan dan minuman beralkohol, jika ada tamu yang meminta maka pihak hotel akan menginformasikan bahwa Villa Bella tidak menyediakan minuman beralkohol.²⁷

Menurut peneliti apabila melihat fakta hotel Grand Madani diatas maka hotel tersebut akan masuk kedalam golongan hotel syari'ah Hilal 2 karena menyediakan fasilitas halal yang memenuhi kebutuhan maksimal wisatawan yang berkunjung ke hotel tersebut. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif, hotel syari'ah digolongkan menjadi 2 yaitu :²⁸

1. Hotel Syari'ah Hilal 1
 - a. Aspek produk yang terdiri dari 8 unsur dan 27 subunsur;
 - b. Aspek pelayanan yang terdiri dari 10 unsur dan 28 subunsur
 - c. Aspek pengelolaan yang terdiri dari 3 unsur dan 6 subunsur
2. dan Hotel Syari'ah Hilal 2
 - a. Aspek produk yang terdiri dari 11 unsur dan 40 subunsur
 - b. Aspek pelayanan yang terdiri dari 10 unsur dan 28 subunsur
 - c. Aspek pengelolaan yang terdiri dari 3 unsur dan 6 subunsur

Berdasarkan wawancara dengan Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) DPD NTB. Beliau mengatakan bahwa “karena kita ingin memperluas pasar atau ingin meraih wisatawan khususnya dari negara-negara islam, tentunya kita harus menyesuaikan artinya harus menyediakan, menyiapkan apa yang mereka butuhkan, bukan berarti dengan adanya pariwisata halal maka akan menghilangkan wisata konvensional akan tetapi berjalan seiringan karena wisata halal merupakan wisata pilihan, dan untuk mendukung wisata halal kami di hotel harus adah mushola, tersedianya Alqur'an di kamar, dan makanan harus disertifikasi halal, hotel di NTB diberikan kebebasan oleh PEMDA NTB untuk menerapkan pariwisata halal dan Ketua PHRI sendiri mengaku tidak ada hambatan sama sekali terkait implementasi pariwisata halal karena menurut beliau tidak susah hanya untuk menambah pasilitis ibadah di dalam hotel.²⁹

²⁷ <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2017/07/04/4570/dukung-pariwisata-halal-hotel-di-gili-trawangan-lombok-utara-ini-usung-konsep-syariah.html>

²⁸ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah

²⁹ Hasil wawancara dengan bapak Lanang selaku Kepala PHRI NTB pada tanggal 12 Juli 2019.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan bapak lanang selaku ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) terlihat bahwa pihak hotel tidak keberatan dan mendukung Peraturan Daerah tentang Pariwisata halal, karena dengan memperluas pasar pariwisata maka hotel harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan wisatawan, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah NTB Tentang Pariwisata Halal

Pasal 14

- (1) Dalam pariwisata halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syari'ah.
- (2) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI
- (3) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. Produk
 - b. Pelayanan; dan
 - c. Pengelolaan
- (4) Dalam hal standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka dalam akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci
 - b. Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah
 - c. Tersedia makanan dan minuman halal
 - d. Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis
 - e. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Akomodasi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal tersebut diatas sangat spesifik mengatur tentang pariwisata halal, yang menarik disini adalah ketika yang menjadi standar halal untuk akomodasi adalah sertifikasi yang dilakukan oleh DSN-MUI, hal ini akan membutuhkan persiapan yang matang bagi penyedia akomodasi dalam memperoleh sertifikat halal.

b. Biro Perjalanan

Biro perjalanan merupakan salah satu sarana yang penting dalam dunia pariwisata karena setiap wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi pastinya akan membutuhkan jasa biro perjalanan. Saat ini perjalanan sudah menjadi suatu kebutuhan manusia yang didorong oleh

berbagai tujuan, antara lain untuk (1) pemenuhan kebutuhan hidup, (2) dorongan rasa ingin tahu, dan (3) dorongan keagamaan, perjalanan tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai pihak terkait agar tujuan perjalanan tersebut dapat memperoleh kepuasan yang diharapkan, salah satunya melalui penggunaan jasa usaha perjalanan wisata.³⁰

Menurut Paizul salah seorang yang bekerja sebagai *Tour Guide* di Kabupaten Lombok Utara mengatakan bahwa ia menyambut baik dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah NTB saat ini karena semakin banyaknya turis yang beragama muslim yang berkunjung ke Lombok saat ini, akan tetapi ia berharap kepada pemerintah untuk menambah dan memperbaiki fasilitas yang ada saat ini seperti toilet umum yang ada di tepi pantai, walaupun ada itu di buat oleh rekan-rekan sesama guide nya yang di buat dari bahan seadanya. Seperti hanya di tutup karung bekas sekelilinya.³¹

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemandu wisata tersebut diatas, peneliti berpendapat bahwa sungguh miris jika Pemerintah NTB sebagai pemberi jalan untuk mengembangkan pariwisata halal di Kabupaten Lombok Utara tidak memperhatikan semua fasilitas penunjang yang ada saat ini padahal wisatawan yang berkunjung membutuhkan kesan dan kenangan yang baik ketika pulang ke daerah asal.

Untuk mendukung pariwisata halal NTB, *Association of the Indonesian Tour And Travel Agencies* (ASITA) telah meluncurkan paket perjalanan bagi wisatawan yang berkunjung ke NTB. Paket 4 hari 3 malam menawarkan wisata ke Desa Sade, Islamic Centre, Masjid Kuno Karang Bayan, Sesaot, Jurang Malang, Benang Kelambu, Gili Nanggu, Gili Sudak, dan Gili Kedis.³² Dan yang menjadi perhatian serius bagi Ketua ASITA NTB adalah ketika akan di terapkanya wisata halal di

³⁰ *Op. Cit* Muljadi A.J. Hal 145

³¹ Hasil wawancara dengan Faizul selaku pelaku usaha biro perjalanan wisata di Lombok Utra, pada tanggal 5 Mei 2019

³² <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/06/04/o89376382-asita-ntb-tawarkan-paket-wisata-halal-keliling-lombok> di akses 19 Juli 2019

Gunung Rinjani, ia mengungkapkan bahwa tidak mengetahui ide semacam itu datang dari mana, ia menambahkan bahwa pariwisata halal adalah strategi, bagi pelaku wisata justru tidak menguntungkan harus dibedakan antara syari'a dan halal.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dan pemaparan oleh ASITA terkait penerapan pariwisata halal diatas terlihat bahwa pelaksanaan pariwisata halal harus benar-benar memperhatikan segala macam aspek yang ada dimasyarakat baik itu akomodasi dan amenities atau fasilitas diluar akomodasi, karena keduanya adalah sarana penunjang pariwisata halal yang sangat penting, pemerintah juga harus melihat tempat dimana pariwisata halal bisa di terapkan. Terkait dengan implementasi pariwisata halal, peneliti melihat adanya peningkatan jika dilihat dari paket wisata yang dibuat oleh ASITA untuk pelancong muslim.

Dalam Peraturan Daerah NTB Tentang Pariwisata Halal dijelaskan kriteria yang menjadi dasar biro perjalanan pariwisata halal yaitu:

Pasal 18

Setiap biro perjalanan pariwisata halal wajib :

- a. Memahami pengelolaan destinasi pariwisata halal
- b. Menyediakan informasi tentang paket pariwisata halal dan perilaku wisatawan (code of conduct) pada destinasi pariwisata halal
- c. Menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria pariwisata halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengacu ketentuan DSN-MUI

Ketentuan untuk biro perjalanan juga diatur oleh Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016. Biro perjalanan wisata syari'ah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip syari'ah
- b. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah
- c. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI
- d. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syari'ah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, Lembaga pembiayaan, Lembaga penjamin, maupun dana pensiun.

- e. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syari'ah
- f. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

c. Restoran

Restoran dalam pariwisata halal merupakan usaha yang sangat dekat hubungannya dengan wisata halal, karena makanan merupakan kebutuhan primer yang wajib ada untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, Lombok sebagai tujuan wisata juga memiliki makanan khas seperti daerah lain di Indonesia diantaranya adalah Plecing Kangkung, Ayam Taliwang, Sate Bulayak, Nasi Balap Puyung, Ares dan masih banyak yang lainnya.

Implementasi pariwisata halal untuk makanan atau minuman halal di restoran atau penyedia makanan bisa dikatakan sukses apabila melihat data pada tabel 5 diatas, dimana penyedia makanan dan minuman mengajukan permohonan sertifikasi halal setiap tahunnya, LPPOM-MUI telah memberikan total 60 sertifikat halal kepada Restoran (Hotel) dari tahun 2012 sampai 2018, dan 256 sertifikat halal kepada Restoran (non Hotel) dan Rumah Makan dari tahun 2015 sampai 2018, Pemberian sertifikat halal kepada penyedia makanan maupun minuman, bukan berarti penyedia makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikat dilarang, akan tetapi sertifikat halal merupakan jaminan produk halal kepada wisatawan agar tidak ragu makanan dan minuman tersebut halal atau tidak.

Dalam Peraturan Daerah NTB Tentang Pariwisata Halal dijelaskan kriteria untuk penyedia makanan maupun minuman sebagai berikut:

Pasal 15

1. Penyedia makanan dalam pariwisata halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga.
2. Penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal wajib menjamin kehalalan makanan atau minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

3. Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal atau non halal pada setiap jenis makanan atau minuman, dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
4. Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI

Dalam Fatwa Mui kriteria Biro Perjalanan Wisata Syari'ah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI
4. Menggunakan jasa Lembaga keuangan Syari'ah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun
5. Mengelola dana investasinya wajib sesuai dengan prinsip Syari'ah
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Dampak Dari Pasal 12 Dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB di Kabupaten Lombok Utara

1. Dampak terhadap masyarakat di Kabupaten Lombok Utara

Pariwisata sebagai bisnis yang langsung berinteraksi dengan masyarakat secara luas akan menimbulkan implikasi sosial, baik itu bersifat positif maupun negatif. Manusia sebagai individu tidak mungkin dapat bertahan hidup dan mempertahankan kehidupannya, tanpa berinteraksi dengan individu-individu lainnya.³³ Demikian halnya dengan pariwisata halal yang telah di terapkan pemerintah NTB saat ini. Dalam menerapkan aturan tentang pariwisata halal, pemerintah NTB harus memberikan sosialisasi dengan sesering mungkin kepada masyarakat agar konsep pariwisata halal yang di berlakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan, karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang konsep pariwisata halal.

³³ Nurul Qamar dkk, 2016, *sosiologi hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal 7.

Menurut Ibu Imratun Soleh yang merupakan pedagang nasi keliling yang biasanya juga berjualan di tempat wisata “mengatakan tidak mengetahui adanya aturan-aturan seperti pariwisata halal, ia mengungkapkan bahwa selama ini ia berjualan dengan cara halal dan makanan yang dijualnya juga di jamin halal”.³⁴ Hamzah salah seorang Tour Guid lepas di Kabupaten Lombok Utara mengatakan “bahwa ia tidak peduli sama sekali dengan pariwisata halal karena ia beranggapan bahwa pariwisata halal akan merusak citra pariwisata yang sudah berjalan saat ini dan kalau pariwisata halal akan berjalan maka wisatawan tidak akan ada yang datang lagi ke Lombok.”³⁵ Sahibul Kahfi salah seorang pengurus Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di Dusun Lendang Luar Kabupaten Lombok Utara mengungkapkan bahwa dengan adanya konsep pariwisata halal maka akan bertambahnya wisatawan yang mengunjungi Lombok, akan tetapi ia menyayangkan bahwa sebagai pokdarwis di Dusun Lendang Luar tidak menemukan perubahan destinasi atau fasilitas oleh pemerintah di kampungnya sendiri, ia juga berharap kepada pemerintah agar menambah fasilitas penunjang pariwisata halal seperti toilet umum dan destinasi wisata berkonsep halal di kampungnya.³⁶

Menurut peneliti dengan menganalisis pendapat masyarakat yang peneliti wawancarai di atas, peneliti mendapatkan beragam pendapat, yang menarik dari wawancara diatas ketika Hamzah mengatakan bahwa “jika pariwisata halal berjalan tidak ada lagi wisatawan yang berkunjung ke Lombok” hal seperti ini merupakan sebuah kesalah pahaman yang terjadi di kalangan masyarakat, peneliti beranggapan bahwa sosialisasi yang kurang dari pemerintah merupakan penyebab ketidak tahuan dari beberapa masyarakat, dan yang sangat di sayangkan adalah ketika pemerintah daerah berencana memisahkan antara tenda laki-laki dan perempuan di Gunung Rinjani, hal ini tentunya memerlukan kajian yang sangat mendalam agar

³⁴ Hasil wawancara dengan Imratun Solehan, pedagang keliling di daerah Kabupaten Lombok barat, tanggal 19 Mei 2019

³⁵ Hasil wawancara dengan Hamzah, Pelaku usaha Tour Guide lepas di Kabupaten Lombok Utara, tanggal 19 Mei 2019

³⁶ Hasil wawancara dengan Sahibul Kahfi, ketua Pokdarwis, Dusun Lendang Luar Lombok Utara, tanggal 20, Mei 2019

konsep pariwisata halal yang telah dan akan dikembangkan tidak berbenturan dengan konsep pariwisata konvensional yang telah ada.

Menurut Lalu Faozal Kepala Dinas Pariwisata NTB, bahwa Pemerintah NTB akan terus melakukan sosialisasi kepada para pelaku industri pariwisata di NTB untuk melengkapi usaha dengan sertifikasi halal baik untuk hotel maupun restoran, faozal tidak menyangkal jika masih banyak hotel yang bergantung pada pariwisata konvensional seperti industri perhotelan, namun faozal menekankan para industri perhotelan untuk juga menyiapkan pelayanan halal bagi wisatawan muslim.³⁷ Menurut Lalu Faozal diatas sesuai dengan Peraturan Daerah NTB yaitu³⁸ :

Pasal 11

- (1) Industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syariah.
- (2) Industri pariwisata konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:
 - a. Arah kiblat di kamar hotel
 - b. Informasi masjid terdekat
 - c. Tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim
 - d. Keterangan tentang produk halal/tidak halal
 - e. Tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan
 - f. Sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
 - g. Tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah NTB perannya sangat penting bagi kemajuan pariwisata halal untuk kedepannya, menurut peneliti sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada setiap pelaku usaha wisata akan tetapi ke seluruh lapisan masyarakat agar tidak ada nya kesalah pahaman dikarenakan minimnya informasi yang didapat oleh masyarakat.

2. Dampak terhadap tingkat kunjungan Wisatawan di Kabupaten Lombok Utara

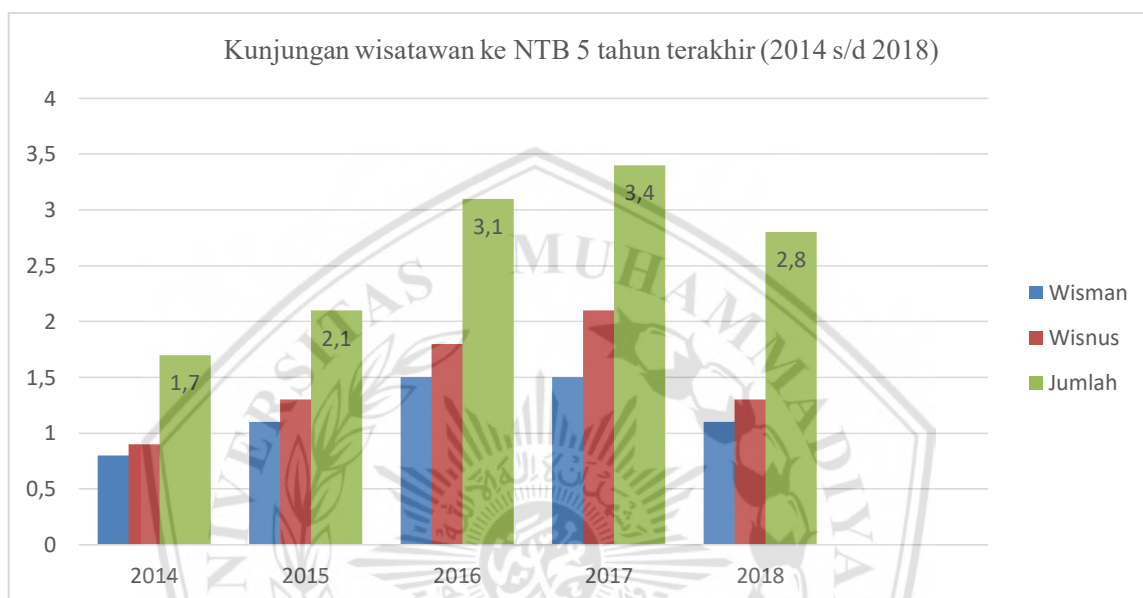
Lombok Utara sebagai destinasi wisata yang telah lama eksis di Indonesia, menjadikan nya memiliki interaksi yang terus meningkat. Dengan

³⁷ <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/wisata-halal/17/07/31/oty7qb425-ntb-dorong-industri-pariwisata-kantongi-sertifikasi-halal> di akses tanggal 20 Mei 2019

³⁸ Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

adanya infrastruktur laut dan udara akan memudahkan akses bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Lombok, dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan agar wisatawan yang berkunjung ke Lombok Utara akan lebih banyak dari sebelumnya.

Berikut merupakan data tingkat kunjungan wisatawan ke NTB sebelum dan sesudah Peraturan Daerah tersebut di berlakukan



Gambar 2. Tingkat kunjungan wisatawan ke NTB

Dalam data diatas terlihat bahwa jumlah wisatawan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, puncak peningkatan kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik terjadi pada tahun 2017 dimana angkanya mencapai hampir 4 juta kunjungan wisatawan. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan dikarenakan bencana alam yang terjadi di Pulau Lombok pada awal bulan agustus 2018. Menurut Kepala Dinas Pariwisata NTB, penurunan angka kunjungan wisatawan paling dirasakan sejak NTB dilanda gempa akhir Juli hingga Agustus 2018, sejak gempa pertamakali pariwisata kita mengalami krisis, karena banyak destinasi, hotel yang ikut terdampak, bahkan destinasi seperti Gunung Rinjani belum normal untuk pendakian.³⁹

³⁹ <https://mataram.antaranews.com/berita/40692/periode-2018-kunjungan-wisatawan-ntb-turun> diakses tanggal 27 Mei 2019

Adapun tingkat kunjungan wisatawan yang menginap di Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 5.

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Utara

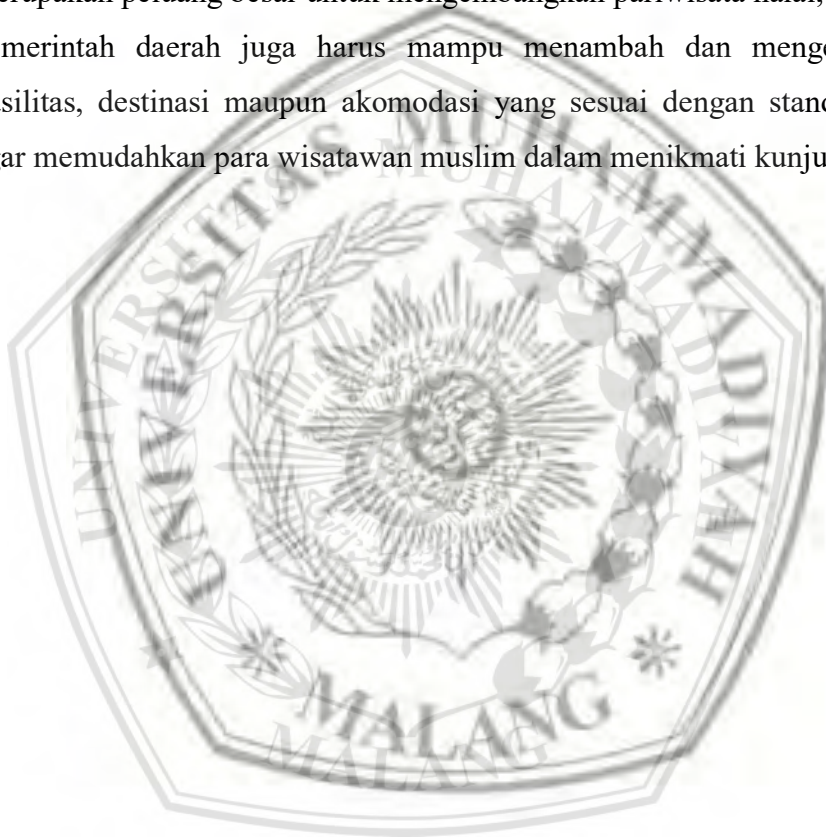
No	Tahun	Wisman	Wisnu	Total
1.	2013	433.207	52.663	485.840
2.	2014	447.797	55.544	503.341
3.	2015	468.687	66.838	535.525
4.	2016	554.224	93.944	648.168
5.	2017	872.001	131.821	1.003.822
5.	2018	511.746	87.697	599.443
5.	2019	52.978	3.741	56.719

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara

Dari Tabel diatas terlihat bahwa tingkat jumlah wisatawan yang menginap di Kabupaten Lombok Utara terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, terlihat pada tahun 2017 merupakan tingkat kunjungan yang paling banyak yaitu 965.344 wisatawan dengan rincian 820.543 wisatawan mancanegara dan 144.801 wisatawan nusantara, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 511.746 wisatawan mancanegara dan 87.697 wisatawan nusantara, hal ini terjadi karena adanya bencana alam gempa bumi pada tahun 2018 yang menimpa Lombok, sedangkan data kunjungan wisatawan pada tahun 2019 merupakan data sementara sampai dengan bulan April.

Menurut Andreas yaitu salah satu wisatawan yang berasal dari Negara Spanyol, ketika ditanya pendapatnya tentang pariwisata halal, “ia mengatakan bahwa ia tidak terlalu peduli dikarenakan ia tidak memiliki agama dan di Negeranya pun banyak wisatawan muslim yang berasal dari Negara tetangganya seperti Maroco, Andreas juga menjelaskan bahwa di spanyol pernah menjadi negara mayoritas muslim dan banyak peninggalan-peninggalan sejarah muslim”. Menurut Carolina wisatawan dari Negara Italia, ketika ditanya tentang peraturan daerah tentang pariwisata halal, “Ia mengatakan bahwa sebagai seorang katolik ia sudah mengetahui resiko jika berkunjung ke negara muslim seperti Indonesia.

Menurut peneliti berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat beragam respons dari beberapa wisatawan yang berkunjung ke Lombok dan memiliki pendapat yang berbeda beda dalam memahami pariwisata halal, menurut peneliti pariwisata halal di Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi yang sangat besar dikarenakan tidak adanya wisatawan yang keberatan dengan adanya konsep pariwisata halal dan banyaknya wisatawan muslim mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara juga merupakan peluang besar untuk mengembangkan pariwisata halal, akan tetapi pemerintah daerah juga harus mampu menambah dan mengembangkan fasilitas, destinasi maupun akomodasi yang sesuai dengan standar syariah agar memudahkan para wisatawan muslim dalam menikmati kunjungan.



Penutup

Kesimpulan

Berangkat dari paparan data temuan maupun analisis peneliti diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan implementsai Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal, Analisi Terhadap Pasal 12 Tentang Industri Pariwisata Halal, adapun kesimpulan yang didapatkan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah NTB dalam mengimplementasikan Pariwisata Halal adalah dengan 1. Melakukan pemasaran dan promosi, dengan rincian disebutkan dalam Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016, kemudian yang ke 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan dengan rincian disebutkan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016, kemudian yang ke 3. Strategi Percepatan yang terdiri dari perkembangan destinasi, meningkatkan infrastruktur pariwisata halal dan pengembangan atraksi dan amenitas pariwisata halal kelas dunia. Sedangkan implementasi industri pariwisata halal yang terdiri dari Akomodasi, Biro perjalanan dan Restoran berjalan dengan baik hal ini dikarenakan beberapa responden dari industri terkait tidak mendapati kendala dalam mengimplementasikan pariwisata halal.
2. Efektivitas pariwisata halal di kabupaten Lombok Utara memiliki dampak yang positif dan negatif diantaranya adalah (1). Dampak terhadap masyarakat Kabupaten Lombok Utara, dari hasil penelitian, peneliti menemukan masih banyak masyarakat yang belum menikmati hasil dari pariwisata halal, hal ini dikarenakan tidak adanya pembangunan yang signifikan di destinasi pariwisata dan minimnya informasi atau sosialisai yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara menyebabkan masyarakat kurang memahami konsep dari pariwisata halal. (2). Dampak terhadap tingkat kunjungan pariwisata, terlihat dari data kunjungan pariwisata ke Kabupaten Lombok Utara dari tahun 2016 yang berjumlah 648.168 kunjungan, menjadi 1.003.822 kunjungan, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 599.443 kunjungan, hal

ini dikarenakan adanya bencana alam gempa bumi 7.0 SR yang mengguncang Lombok dan kenaikan harga tiket penerbangan yang signifikan menyebabkan kurangnya minat wisatawan.

Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, agar mendengarkan aspirasi masyarakat yang mengeluhkan tentang pembangunan yang nyata terkait dengan destinasi pariwisata halal, karena akan menjadi sia-sia sebuah aturan jika tidak dibarengi dengan pembangunan yang berkelanjutan, disamping itu dengan adanya pembaharuan dan pembangunan destinasi pariwisata halal akan berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan.
2. Bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara, agar ikut serta dalam mendukung dan membangun pariwisata halal karena dengan adanya payung hukum yaitu Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016, maka akan mempermudah masyarakat dalam mengimplementasikan pariwisata halal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, Penelitian Hukum (Legal Research), Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 108 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Sayari'ah
- Gamal Suwantoro .2004, Dasar-Dasar Pariwisata Yogyakarta: Yogyakarta Andi.
- Made Metu Dahana, 2012. Perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan, Paramita Surabaya.
- Muhammad Djakfar, 2017. Pariwisata Halal Perspektif multi dimensi, UIN-maliki Press
- Nurul Qamar dkk, 2016, sosiologi hukum, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Yoeti. 2008, Pemasaran Pariwisata Terpadu. Bandung: Angkasa.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Peraturan Daerah NTB No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah
- Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata

Jurnal :

- A.Muchaddam Fahham. Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat. Aspirasi Vol. 8 No. 1 Juni 2017
- Akhmad Saefudin Adinugraha dkk. Desa Wisata : Konsep dan Implementasinya di Indonesia, dalm jurnal Human Falah: Volume 5. No. 1 Januari – Juni 2018
- Alwafi Ridho Subarkah, 2018. Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). Jurnal Sospol, Volume 4 No 2 (Juli-Desember 2018).

**DAFTAR RESTORAN YANG TELAH DISERTIFIKASI HALAL OLEH LPPOM MUI-NTB
PROGRAM MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS PRODUK	NAMA PRODUK	VALID DATE
I	II	III	IV	V	VI
KOTA MATARAM					
1	FIZZ RESTO HOTEL LOMBOK	Jl. Majapahit No. 31 Mataram (Firaz Pariska 081236050303/0818364831)	Restoran	Restoran Hotel	14 Februari 2020
2	PT. PEJANGGIK CAKRA BUANA "LOMBOK PLAZA HOTEL"	Jl. Pejanggih No. 8 Mataram (Budi Harto 087864308427)	Restoran	Restoran Hotel	29 Mei 2020
3	PT. NUTANA LOMBOK SEJAHTERA	Jl. Airlangga Selatan No. 14 Mataram	Restoran Hotel	D' Warung Restoran	2 Juli 2020
4	PT. BRILLIAN PANCA KENCANA (ASTON INN MATARAM)	Jl. Panca Usaha No. 1 Lingkungan Banjar Pande Selatan Kel. Cilinaya Mataram (Ciputra 08175715508)	Restoran	Restoran Hotel	20 Juli 2020
5	HOTEL LOMBOK GARDEN (PT. Bintang Grana Darma)	Jl. Bung Karno No. 7 Mataram (Mardi 087865254192)	Restoran Hotel	Restoran Hotel	11 September 2020
6	HOTEL SANTIKA MATARAM (PT. Metro Lombok Asri)	Jl. Pejanggih No. 32 Mataram Barat, Selaparang Kota Mataram (R. Reza Bovier 081907037377)	Restoran Hotel	Restoran Hotel	3 Noveber 2020
7	PURI INDAH HOTEL & CONVENTION/ CV. PURI INDAH	Jl. Sriwijaya No. 132 Kelurahan Cilinaya Kec. Cakranegara (Ni Putu Febrina 085238389446)	Restoran	Restoran Hotel	27 Desember 2020

KABUPATEN LOMBOK BARAT

1	KILA SENGGIGI BEACH LOMBOK (PT. SENGGIGI PRATAMA INTERNASIONAL)	Jl. Pantai Senggigi PO BOX 1001, Senggigi (Erik Ramadhan Tumbelaka 081236222480)	Restoran	Restoran Hotel	10 April 2020
3	HOTEL BUKIT SENGGIGI	Jl. Raya Senggigi KM 13 Senggigi, Kab. Lombok Barat	Restoran	Restoran Hotel	23 Mei 2020
4	SVARGA RESORT LOMBOK (Salza Restaurant)	Jl. Raya Senggigi-Kerandangan, Kabupaten Lombok Barat (Ali M. Yusuf 087865674768)	Restoran Hotel	Restoran Hotel	11 Oktober 2020

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

1	NOVOTEL	Mandalika Resort Pantai Putri Nyale Kuta Pujut Kab. Lombok Tengah (Agung Rinjani +62(0)8113961333)	Restoran Hotel	Restoran Hotel	17 September 2020
2	D-MAX HOTEL (PT. Jaya Cipta Hotel)	Jl. Raya Bypass BIL Km. 2 Praya Kab. Lombok Tengah (Jannari Lesmana 081917001888)	Restoran Hotel	Restoran Hotel	11 Oktober 2020

DAFTAR SERTIFIKAT HALAL RESTORAN TAHUN 2016

NO	No. Sertifikat Halal	Jenis Produk	Nama/Merk Produk	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kadaluarsa Sertifikat	berlaku
1	2731 0008480216	Restoran	RM. Honngkong	RM. Hongkong	Jl. Sriwijaya No. 333 Epicentrum Mall Mataram	03 Februari 2018	04 Februari 2016
2	2731 0008490216	Restoran	Mie Ayam 88	Mie Ayam 88	Jl. Sriwijaya No. 333 Epicentrum Mall Mataram	03 Februari 2018	04 Februari 2016
3	2731 0008500216	Restoran	Royal Ayam Kampung	Royal Ayam Kampung	Jl. Sriwijaya No. 333 Epicentrum Mall Mataram	03 Februari 2018	04 Februari 2016
4	2731 0008510216	Restoran	Momiji	Momiji	Jl. Sriwijaya No. 333 Epicentrum Mall Mataram	03 Februari 2018	04 Februari 2016
5	2731 0008520216	Restoran	Segare Sea Food	Segare Sea Food	Jl. Sriwijaya No. 333 Epicentrum Mall Mataram	03 Februari 2018	04 Februari 2016
6	2731 0008530216	Restoran	Mpek-mpek Anisandy	Mpek-mpek Anisandy	Jl. Sriwijaya No. 333 Epicentrum Mall Mataram	03 Februari 2018	04 Februari 2016
7	2731 0008540216	Restoran	Nasi Padang	RM. Padang (SBS)	Jl. Sriwijaya No. 333 Epicentrum Mall Mataram	03 Februari 2018	04 Februari 2016
8	2731 0008550216	Restoran	Nasi Puyung Rinjani	Nasi Balap Puyung	Jl. Sriwijaya No. 333 Epicentrum Mall Mataram	03 Februari 2018	04 Februari 2016
9	2731 0008560216	Restoran	Prima Rasa	Prima Rasa	Jl. Sriwijaya No. 333 Epicentrum Mall Mataram	03 Februari 2018	04 Februari 2016
10	2731 0008570216	Restoran	Warung Banjar	Warung Banjar	Jl. Sriwijaya No. 333 Epicentrum Mall Mataram	03 Februari 2018	04 Februari 2016
11	2731 0008580216	Restoran	Mama Steak	Steak	Jl. Sriwijaya No. 333 Epicentrum Mall Mataram	03 Februari 2018	04 Februari 2016
12	2731 0008640316	Restoran Hotel	D' Warung Restoran	Nutana Hotel	Jl. Airlangga No. 14 Mataram	04 Maret 2018	05 Maret 2016
13	2731 0008650316	Restaurant Hotel	Kangkung Restaurant	Pratama Hotel	Jl. Adi Sucipto No. 10 Mataram	04 Maret 2018	05 Maret 2016
14	2731 0008680416	Restoran	Indonesia Food	Delta Indo (Food Caurd I)	Bandara Internasional Lombok , Kab. Lombok Tengah	10 April 2018	11 April 2016
15	2731 0008690416	Restoran	Indonesia Food	Delta Indo (IPO)	Bandara Internasional Lombok ,	10 April 2018	11 April 2016

NO	No. Sertifikat Halal	Jenis Produk	Nama/Merk Produk	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kadaluarsa Sertifikat	berlaku
					Kab. Lombok Tengah		
16	2731 0008700416	Restoran	Indonesia Food	CV. Surya (Indocuisian)	Bandara Internasional Lombok , Kab. Lombok Tengah	10 April 2018	11 April 2016
17	2731 0008720416	Restoran	Indonesia Food	CV. Surya (Food Caurd 3)	Bandara Internasional Lombok , Kab. Lombok Tengah	10 April 2018	11 April 2016
18	2731 0008750416	Restoran	Makanan Siap Saji	CV. Christly Jaya (Dante Coffee)	Bandara Internasional Lombok , Kab. Lombok Tengah	10 April 2018	11 April 2016
19	2731 0008760416	Restoran	Bakso Lapangan Tembak Senayan	CV. Veranda Kencana	Bandara Internasional Lombok. Jl. By Pass Tanak Awu Praya Kab. Lombok Tengah	10 April 2018	11 April 2016
20	2731 0008770416	Restoran	Air Port Lounge By Sheraton	PT. Rajawali Adi mandalika	Jln Raya Senggigi KM 8 PO BOX 1154 Mataram 83001 Senggigi	10 April 2018	11 April 2016
21	2731 0008780416	Restoran	Mawar Saron Restaurant	Puri Saron Hotel	Jl. Raya Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat	10 April 2018	11 April 2016
22	2731 0008790416	Restoran	Aneka Makanan Siap Saji	Kila Senggigi Beach Lombok & Pool Villa Club (PT. Senggigi Pratama Internasional)	Jl. Pantai Senggigi PO BOX 1001, Senggigi Kabupaten Lombok Barat	10 April 2018	11 April 2016
23	2731 0008840516	Restoran	Makanan Siap Saji	The Santosa Villas dan Resort	Jl. Raya Senggigi Kecamatan Batu Layar Kab. Lombok Barat	13 Mei 2018	14 Mei 2016
24	2731 0008860616	Restoran	Makanan Siap Saji	CV. Rajawali Cipta Buana (M Hotel)	Jl. Rajawali Lingkungan Karang Kauhan, Kelurahan Cakranegara Barat	15 Juni 2018	16 Juni 2016
25	2731 0008870616	Restoran	Makanan Siap Saji	CV. Akaya Food (Ita dakimasu)	Jl. Sriwijaya No. 333 Epicentrum Mall Mataram	15 Juni 2018	16 Juni 2016
26	2731 0008880616	Restoran	Makanan Siap Saji	PT. Langko Anugrah Sejahtera (Fave Hotel)	Jl. Langko No. 21 - 23 Dasan Agung Mataram	15 Juni 2018	16 Juni 2016

NO	No. Sertifikat Halal	Jenis Produk	Nama/Merk Produk	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kadaluarsa Sertifikat	berlaku
27	2731 0002360512	Restoran	Makanan Siap Saji	PT. Pejanggih Cakra Buana "Lombok Plaza Hotel dan Convention"	Jl. Pejanggih No. 8 Cakranegara Mataram	23 Mei 2018	20 April 2016
28	2731 0002370512	Restoran	Makanan Siap Saji	Bukit Senggigi Hotel	Jl. Raya Senggigi KM 13 Kecamatan Batulayar Kab. Lombok Barat	23 Mei 2018	20 April 2016
29	2731 0008800416	Restoran	Ayam Taliwang	Roemah Langko	Jl. Langko No. 68 Ampenan	19 April 2018	20 April 2016
30	2731 0008810416	Restoran	Makanan Siap Saji	Lesehan Gading Sayang-sayang	Jl. Ahmad Yani - Sayang-sayang	19 April 2018	20 April 2016
31	2731 0004940314	Restoran	Makanan Siap Saji	RUMAH MAKAN HONGKONG	Jl. Palapa 1/2A Br Pande Cakranegara	23 Maret 2018	27 Juni 2016
32	2731 0009160616	Restoran	Makanan Siap Saji	LESEHAN "ASRI"	Jl. Basuki Rahmat No.18 Praya - Lombok Tengah		27 Juni 2016
33	2731 0009170616	Restoran	Makanan Siap Saji	RM. RIA	Jl. PB SUDIRMAN		27 Juni 2016
34	2731 0009180616	Restoran	Makanan Siap Saji	UD. Cahaya Bil (RM CAHAYA I	Jl. Bay Pas Bil .Desa Tanak Awu Kec. Pujut		27 Juni 2016
35	2731 0009190616	Restoran	Makanan Siap Saji	PT. NUSA WISATA INDAH / D'PRAYA HOTEL	PT. Nusa Wisata Indah/D'Praya Hotel, Jl. Raya Penujak No. 88 Praya Barat Kab. Lombok Tengah		27 Juni 2016
36	2731 0004940314	Restoran	Makanan Siap Saji	"Rumah Makan Hongkong"	Jl. Palapa 1/ 2A Br Pande Cakranegara	23 Maret 2018	27 Juni 2016
37	2731 0010040816	Restoran/Rumah Makan	Makanan Siap Saji	Lesehan Asri	Jl. Basuki Rahmat No. 18 Praya-Lombok Tengah	29 Agustus 2018	30 Agustus 2016
38	2731 0004600214	Restoran	Makanan Siap Saji	RM. Sumber Rejeki	Jl. Mareje No 21 Prapen, Praya Kab. Lombok Tengah.	08 Februari 2018	10 Oktober 2016
39	2731 0010171016	Restoran	Makanan Siap Saji	RM . Cahaya Puyung	Jl. Diponegoro ,Tiga Dara Praya Kab. Lombok Tengah.	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
40	2731 0010181016	Restoran	Makanan Siap Saji	RM. Maduratna	Jl. Sakura No. 4 Praya . Kab. Lombok Tengah.	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016

NO	No. Sertifikat Halal	Jenis Produk	Nama/Merk Produk	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kadaluarsa Sertifikat	berlaku
41	2731 0010191016	Restoran	Makanan Siap Saji	Lesehan Sakura	Jl. Sakura No.2 Praya Kab. Lombok Tengah.	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
42	2731 0010201016	Restoran	Makanan Siap Saji	Lesehan Ayu	Jl. Hasanuddin N0. 9 Praya. Kab. Lombok Tengah	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
43	2731 0010211016	Restoran	Makanan Siap Saji	Lesehan Taliwang Cakra	Jl. Sukarno Hatta , Barat Mesjid Agung Praya Kab. Lombok Tengah.	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
44	2731 0010221016	Restoran	Makanan Siap Saji	RM. Nurina	Jl. Gajah Mada 98 Leneng Praya Kab. Lombok Tengah.	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
45	2731 0010231016	Restoran	Makanan Siap Saji	Kantin Demokrasi Puyung II	Kauman Praya , Kab Lombok Tengah..	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
46	2731 0010241016	Restoran	Makanan Siap Saji	Warung Makan Dobel Koki	Jl. Basuki Rahmat No. 24 Balungadang Praya , Kab. Lombok Tengah	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
47	2731 0010251016	Restoran	Makanan Siap Saji	“UD DITA “ Warung Taliwang.	Jl. Mareje No. 6 Praya, Kab. Lombok Tengah	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
48	2731 0010261016	Restoran	Makanan Siap Saji	Depot GMR	Jl. S Parman Praya , Kab. Lombok Tengah.	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
49	2731 0010271016	Restoran	Makanan Siap Saji	Warung Taliwang Menia	Jl. Rinjani Praya K ab. Lombok Tengah.	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
50	2731 0010281016	Restoran	Makanan Siap Saji	Bakso Merem	Jl. Dewantara Kauman Praya. Kab. Lombok Tengah	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
51	2731 0010291016	Restoran	Makanan Siap Saji	UD. Sanjaya	Jl. H. Abdullah Tiwu Bokah Praya . Kab Lombok Tengah.	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
52	2731 0010301016	Restoran	Makanan Siap Saji	Warung Nasi Barokah	KM. Tiwu Bokah Praya Kab. Lombok Tengah	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
53	2731 0010311016	Restoran	Makanan Siap Saji	Rumah Makan Pelangi	Tengari Kel. Praya Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
54	2731 0010331016	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	MBA Mie Ayam Bakso	Depan Masjid Raya	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016

NO	No. Sertifikat Halal	Jenis Produk	Nama/Merk Produk	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kadaluarsa Sertifikat	berlaku
55	2731 0010371016	Restoran	Makanan Siap Saji	New Furama Tepi Sawah	Jl. Ahmad Yani Sayang-sayang	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
56	2731 0010401016	Restoran	Makanan Siap Saji	Warung Bu Ani	Jln. . Ahmad Yani No. 16 Kauman Praya . Kab Lombok Tengah	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
57	2731 0010421016	Restoran	Makanan Siap Saji	Pondok Momon (Kedai Makan)	Jln. Ahmad Yani No. 10 Praya - Lombok Tengah	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
58	2731 0010431016	Restoran	Makanan Siap Saji	Warung Renteng	Jln. Pasar Renteng / Barat Terminal	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
59	2731 0010441016	Restoran	Nasi Ayam Cobek	Lesehan Puri Boga	Jl. Pahlawan Praya (Renteng).	09 Oktober 2018	10 Oktober 2016
60	2731 0002410912	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	Restoran PT. Bintang Grana Datma / Hotel Lombok Garden	Jl. Bung Karno No. 07 Mataram	#####	10 Oktober 2016
61	2731 0011631216	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	Kedai Ginaya	Sebelah Barat LCC Gerimax Narmada	19 Desember 2018	20 Desember 2016
62	2731 0011641216	Restoran	Makanan Siap Saji	Spearos / Salma	Jln. Jendral Sudirman Gegutu Timur Rembiga	19 Desember 2018	20 Desember 2016
63	2731 0011651216	Restoran	Makanan Siap Saji	Rinjani Logde	Senaru Bayan Kabupaten Lombok Utara	19 Desember 2018	20 Desember 2016
64	2731 0011661216	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	Warung Bastine	Jl. Raya Pemenang Samping Masjid Jami' Pemenang - KLU	19 Desember 2018	20 Desember 2016
65	2731 0011671216	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	Rumah Makan Taliwang	Jalan Raya Pemenang KLU	19 Desember 2018	20 Desember 2016
66	2731 0011681216	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	Warung Hamidah	Montong Majalangu, Desa Sokong Tanjung, (Terminal Tanjung) KLU	19 Desember 2018	20 Desember 2016
67	2731 0011701216	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	Warung Niniek	Jln. Raya Tanjung Belencong Ds. Midang (Depan Perumahan BSA)	19 Desember 2018	20 Desember 2016

NO	No. Sertifikat Halal	Jenis Produk	Nama/Merk Produk	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kadaluarsa Sertifikat	berlaku
68	2731 0011711216	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	Hotel Arum Jaya	Jln. Pancaka No. 27 Mataram	19 Desember 2018	20 Desember 2016
69	2731 0002320512	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	Pawon Mirasa	Jln. Bung Karno Mataram	22 Mei 2018	20 Desember 2016
70	2731 0011731216	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	RM. Bawak Belimbing	Jln. Pariwisata Banyumulek, Kab. Lombok Barat	19 Desember 2018	20 Desember 2016
71	2731 0011741216	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	CV. Omah Cobek	Lombok Epicentrum Mall Lantai 2 Jl. Sriwijaya 333 Mataram	19 Desember 2018	20 Desember 2016
72	2731 0011751216	Restoran	Makanan Siap Saji	CV. Lombok Kopi Jaya (My Kopi 01)	Jln. Sriwijaya No. 333 Epicentrum Mall	19 Desember 2018	20 Desember 2016
73	2731 0011781216	Restoran Hotel	Makanan Siap Saji	Hotel Dienda Hayu	Jln. Untung Surapati No. 28 Praya, Kab. Lombok Tengah	19 Desember 2018	20 Desember 2016
74	2731 0011791216	Restoran	Makanan Siap Saji	Penginapan Artha	Jl. Pahlawan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	19 Desember 2018	20 Desember 2016
75	2731 0011801216	Restoran	Makanan Siap Saji	Wisma Dhana	Jl. Pahlawan No. 10 Praya – Kab. Lombok Tengah	19 Desember 2018	20 Desember 2016
76	2731 0011091116	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	RM .Viola	Jln . Raya Raden Puguh Kec. Puyung Kab. Lombok Tengah	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
77	2731 0011101116	Restoran	Bakso , Mie Ayam	Bakso Solo Tenda Biru	Jln . Raya Raden Puguh Kec. Puyung Kab. Lombok Tengah	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
78	2731 0011111116	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	Nasi Balap Waker Puyung	Jln . Raya Raden Puguh Kec. Puyung Kab. Lombok Tengah	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
79	2731 0011121116	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	Warung Pojok	Jln . Raya Raden Puguh Kec. Puyung Kab. Lombok Tengah	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
80	2731 0011131116	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	RM, Cotto Makassar	Jln. Pariwisata No. 44 Mataram	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
81	2731 0011151116	Restoran	Makanan Siap Saji	Lesehan Bale Bamboo & Galery	Jln. Jendral Sudirman N0 77 X Gegutu Rembiga Kec.Selaparang	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016

NO	No. Sertifikat Halal	Jenis Produk	Nama/Merk Produk	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kadaluarsa Sertifikat	berlaku
82	2731 0011161116	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	Bebek & Ayam Bumbu Ijo Ibu Fenny G	Jln. Tumpang Sari No. 40 Cakranegara	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
83	2731 0011171116	Restoran	Makanan Siap Saji	Rumah Makan Taliwang Alam Nyaman	Jln Adisucipto No. 15 A Kebon Roek Ampenan	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
84	2731 0011181116	Restoran	Makanan Siap Saji	Roemah Kayana	Jln. Parta No. 4 Abian Tubuh Utara	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
85	2731 0011191116	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	RM. .Kali Sari	Jl. Ahmad Yani, Sayang-sayang	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
86	2731 0011201116	Rumah Makan	Makanan Siap saji	RM. Jontal Telu	RT. 02/08 Tabola Ling. Kemuter Telu Kec. Taliwang KSB	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
87	2731 0011241116	Restoran	Makanan Siap saji	RM. Puyung (Warung Lombok Nasi Puyung)	Jln Sultan Sahrin Kel. Bugis Kec. Taliwang KSB	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
88	2731 0011251116	Restoran	Makanan Siap saji	Lesehan Cinnamon	Jln. Bung Karno Komplek C . Kel. Kuang Kec. Taliwang KSB	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
89	2731 0011261116	Rumah Makan	Makanan Siap saji	RM Ano Rawi	RT. 03/01/Kel. Kuang Kec Taliwang KSB	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
90	2731 0011271116	Rumah Makan	Makanan Siap saji	RM. Bening	Jln. Bagik Bungkur Desa Beru Kec. Jerewach KSB	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
91	2731 0011281116	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	RM. Citra	RT. 01/01 Dsn. Mekar Sari Bukit Damai Kec. Maluk. KSB	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
92	2731 0011291116	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	Warung Makan Tiga Putri	RT. 01/01/ Pasir Putih Kec. Maluk KSB	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
93	2731 0011301116	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	RM. Permata Bundo	RT. 01/01 Ds. Mantun Kec Maluk KSB	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
94	2731 0011311116	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	RM. Luwes	RT. 08/RW. 04 Benete Kec. Maluk KSB	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016

NO	No. Sertifikat Halal	Jenis Produk	Nama/Merk Produk	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kadaluarsa Sertifikat	berlaku
95	2731 0011321116	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	RM. Setia Jaya	RT. 19/09 Seteluk Tengah Kec. Seteluk KSB	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
96	2731 0011331116	Rumah Makan	Makanan Siap Saji	RM Hidayah	RT. 01/02 Seteluk Atas Kec. Seteluk KSB	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
97	2731 0011341116	Restoran	Makanan Siap Saji	RM . Taliwang H. Moerad	Jln. Pelikan No..6 Pajang Timur Mataram	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
98	2731 0005501114	Restoran	Makanan Siap Saji	RM. Omah Cobek	Jln. Maktal No. 6 Cakranegara - Mataram	23 Nopember 2018	21 Nopember 2016
99	2731 0011361116	Restoran	Makanan Siap Saji	Lesehan Yeni Murad	Jln. Jenderal Sudirman	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
100	2731 0011371116	Restoran	Makanan Siap Saji	RM . Brantas	Jln. R. Suprpto No. 16 Mataram	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
101	2731 0011391116	Restoran	Makanan Siap Saji	Sate Rembiga Ibu Simnasih	Jln. DR. Wahidin No. 8 Rembiga Mataram	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
102	2731 0011401116	Restoran	Restoran Hotel	The Kuta Indah	Jln. Raya Kuta Mawun, Kuta Kab. Lombok Tengah	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
103	2731 0011411116	Restoran	Restoran Hotel	PT . Aerotel Tastura	Jln. Raya Pantai Kuta Kabupaten Lombok tengah	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
104	2731 0011421116	Restoran	Restoran Hotel	PT. Istana Putri Mandalika / Novotel Lombok Resort Villas	Mandalika Resort Pantai Putri nyale , Kuta, Pujut Lombok Tengah	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
105	2731 0011431116	Restoran	Makanan Siap Saji	RM. Murah	Jln. Yos Sudarso Gg Sunda Sukaraja Barat	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
106	2731 0011441116	Restoran	Makanan Siap Saji	New Furama Senggigi	Jln. Raya Senggigi – Lombok Barat.	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
107	2731 0011451116	Restoran	Makanan Siap Saji	Warung Serena	Jln. Caturwarga No. 35 Matraram	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
108	2731 0011461116	Restoran	Restoran Hotel	PT. Bhanu Aria Wisata (Arianz Hotel)	Jln. Catur Warga No. 33 Mataram	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016

NO	No. Sertifikat Halal	Jenis Produk	Nama/Merk Produk	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kadaluarsa Sertifikat	berlaku
109	2731 0011471116	Restoran	Restoran Hotel	Hotel Queen	Jln. Pahlawan Praya Kab. Lombok Tengah	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
110	2731 0011481116	Restoran	Makanan Siap Saji	RM. Lesehan Taliwang Sifa	Jln. Arya Banjar Getas (Selatan Makam Pahlawan), Praya Kabupaten Lombok Tengah	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
111	2731 0011491116	Restoran	Makanan Siap Saji	RM. Lesehan Taliwang Tifa	Jln. Jenderal Sudirman, Komplek Pasar Seni Sayang-Sayang Mataram	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
112	2731 0011501116	Restoran	Makanan Siap Saji	Cinema XXI	Lombok Epicentrum Lantai II	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
113	2731 0011511116	Restoran	Makanan Siap Saji	Mulyo Jaya Abadi / Onok-Onok	Jln. Bung Karno - Mataram	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
114	2731 0011521116	Restoran	Makanan Siap Saji	City Club Café	Mataram Mall II Lantai 2, Blok 20-21 Cakranegara	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
115	2731 0011531116	Restoran	Makanan Siap Saji	Lesehan Mimi Asri	Jln. Jendral Sudirman Mataram	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016
116	2731 0011541116	Restoran	Makanan Siap Saji	Taliwang Harapan	Jln. DR. Sutomo Kel. Karang Baru Selaparang Mataram	20 Nopember 2018	21 Nopember 2016

